

Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Syarifah Azzahra ^{1*}, Puti Andiny ², Yani Rizal ³, Safuridar Safuridar ⁴
¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Langsa - Aceh
Email : [syarifahaazzahra@gmail.com](mailto:syarifahazzahra@gmail.com) ¹, putiandiny@unsam.ac.id ², yanirizal@unsam.ac.id ³, safuridar@unsam.ac.id ⁴

Alamat: Jalan Prof Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa – Aceh, Indonesia
Korespondensi penulis: [syarifahaazzahra@gmail.com](mailto:syarifahazzahra@gmail.com) *

Abstract. *Economic growth is one of the most important indicators in analyzing economic development that occurs in a region or country. Economic growth shows the extent to which economic activity will generate additional income for the community in a certain period. This research aims to look at the influence of regional taxes, direct spending and indirect spending on economic growth in Aceh Province in 2014 - 2023. The data used in this research is secondary data in the form of a time series taken from the last 10 years sourced from the Central Agency. Aceh Province Statistics (BPS) using a quantitative approach. The method used is multiple linear regression analysis. Based on the research results, it can be concluded that Regional Taxes, Direct Expenditures and Indirect Expenditures do not have a significant influence on Economic Growth in Aceh Province in the 2014-2023 period, either individually (separately) or simultaneously (together).*

Keywords: *Economic Growth; Local Tax; Direct Purchase; Indirect Expenditure*

Abstrak Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah atau negara, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2014 - 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* yang diambil dari 10 tahun terakhir yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh pada periode 2014 - 2023, baik secara individu (terpisah) maupun secara simultan (bersama-sama).

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Pajak Daerah; Belanja Langsung; Belanja Tidak Langsung

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk mengalami kemajuan kearah yang lebih baik untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil, berpotensi, berdaya saing, lebih maju tidak pantang menyerah dan mempunyai jiwa yang besar dalam menuju perubahan. Hendaknya semua masyarakat Indonesia mendukung dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta mempunyai masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia (Arsyad,2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel penting di dalam ekonomi makro secara agregat. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan keadaan ekonomi suatu negara yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami peningkatan jika kondisi perekonomian negara tersebut mengalami perubahan akan peningkatan kondisi ekonominya yang lebih tinggi dari yang dicapai sebelumnya. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produksi barang industri, peningkatan sektor jasa, bertambahnya produksi barang modal, serta berkembangnya infrastruktur di negara tersebut (*Yuniwinsah dan Anis, 2018*).

Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional rill. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor - faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional rill yang dicapai oleh suatu Negara (*Sukirno, 2004*).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (*Sjafrizal, 2008*).

Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2019	4,14
2020	-0,37
2021	2,81
2022	4,21
2023	4,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,14 persen turun menjadi 2,81 persen di tahun 2021, dan meningkat menjadi sebesar 4,23 persen di tahun 2023.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Sementara itu, pemulihan ekonomi global, pelanggaran pembatasan, dan adaptasi pelaku usaha terhadap tatanan baru menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan, dimana dana yang terkumpul dari pemungutan pajak ini akan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi, contoh dari alokasi seperti pembangunan infrastruktur daerah. Pajak daerah ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan pajak ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti orang atau badan dan benda bergerak atau tidak bergerak.

Ada beberapa cara pajak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) pajak yang dibebankan kepada individu dan perusahaan akan menimbulkan disinsentif bagi dunia usaha apabila tingkat pengembalian untuk tabungan, upah, dan investasi terlalu kecil akibat dikenakan pajak yang sangat besar, sehingga kegiatan produksi menjadi berjalan lambat; (2) timbul kecenderungan penurunan inovasi dan kegiatan kewirausahaan akibat adanya pengenaan pajak atas bisnis dan pendapatan investasi perorangan dan keuntungan modal; (3) diskriminasi pajak terkait barang dan jasa yang berbeda dapat menyebabkan timbulnya deadweight losses (DWL); (4) penerapan pajak tertentu seperti pajak yang dikenakan pada transaksi akan menghalangi orang untuk berpindah investasi atau bertukar aset dengan cara lain; (5) Pajak yang digunakan untuk membiayai program kesejahteraan dapat mengurangi insentif kerja, insentif berlatih atau memperoleh promosi, dan insentif untuk menabung (*Booth, 2016*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006 tersebut terdiri dari belanja: (1) belanja pegawai; (2) hibah; (3) belanja bantuan sosial; (4) belanja bantuan keuangan; dan (5) belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; dan (3) belanja modal.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Alokasi belanja dari pemerintah daerah merupakan salah satu indikator percepatan pembangunan yang terjadi di daerah, dimana alokasi belanja ini kemudian dibagi dalam dua kategori utama yakni belanja langsung dan tidak langsung. Dalam suatu perekonomian sangat dibutuhkan peran serta pemerintah untuk berbagai jenis pembelanjaan seperti halnya pengeluaran untuk membiayai, membangun dan memperbaiki infrastruktur, pendidikan dan kesehatan merupakan pengeluaran wajib pemerintah atau dengan kata lain pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah (belanja langsung dan tidak langsung).

Belanja Langsung menurut Mendagri No 13 Tahun 2006 adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD jadi belanja langsung adalah ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Menurut *Soleh dan Rochmansjah (2010:42)*, belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik. Belanja tidak langsung merupakan sejumlah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2. Indikator Ekonomi Provinsi Aceh 2019 – 2023 (Persen)

Tahun	Pajak Daerah	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2019	7,65	-3,26	67,31
2020	-9,5	-18,78	40,38
2021	3,49	3,33	0
2022	0,69	18,18	9,25
2023	11,71	-31,4	-20,88

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan data dari Tabel 2 dapat dilihat penerimaan pajak daerah Provinsi Aceh tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan. Penerimaan pajak daerah meningkat dari 7,65 persen di tahun 2019, menjadi 11,71 persen di tahun 2023. Sedangkan jika dilihat dari belanja langsung tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 untuk belanja langsung 2021 sebesar 3,33 persen, di tahun 2022 meningkat sebesar 18,18 persen dan menurun menjadi -31,4 persen di tahun 2023. Sedangkan belanja tidak langsung Provinsi Aceh tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 67,31 persen, menurun menjadi -20,88 persen di tahun 2023. Fluktuasi dalam penerimaan pajak daerah dan belanja daerah di Provinsi Aceh antara 2019 hingga 2023 dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, serta perubahan prioritas anggaran. Penerimaan pajak daerah meningkat karena pemulihan ekonomi dan perbaikan sistem perpajakan, sementara belanja langsung dan tidak langsung mengalami fluktuasi tajam sebagai respons terhadap kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan salah satu faktor penyangga terwujudnya kesejahteraan sosial dalam sebuah negara.

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah diuraikan tentang pajak daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi itu sendiri sebab di dalam pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi menurut (*boediono, 1999:8*), adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian ini mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Pajak Daerah

Pajak adalah instrumen penting dalam menjalankan perekonomian. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, yaitu mengatur lalu lintas pergerakan ekonomi dalam masyarakat. Pada saat ekonomi tumbuh terlalu cepat maka pemerintah melakukan pengetatan penarikan pajak (kebijakan kontraktif), sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi berjalan lambat maka pemerintah akan melakukan pelonggaran tarif pajak (kebijakan ekspansif). Peningkatan peran pajak berimplikasi penting karena pajak berkaitan dengan pendapatan disposibel yang berhubungan dengan angka pengganda perekonomian yang artinya nanti akan berpengaruh terhadap iklim investasi (*Myles, 2000*).

Kesit (2003) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah kegiatan belanja yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Tidak Langsung

Menurut *Erlina & Sakti (2015)* Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang telah dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran belanja tidak langsung sangat penting untuk operasi yang efisien dari mekanisme sistem pemerintahan, serta upaya untuk mempromosikan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan memenuhi sarana dan tujuan dari setiap tahap pertumbuhan. Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Finansial, dan Belanja Tak Terduga merupakan kategori belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program kegiatan. Belanja tidak langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

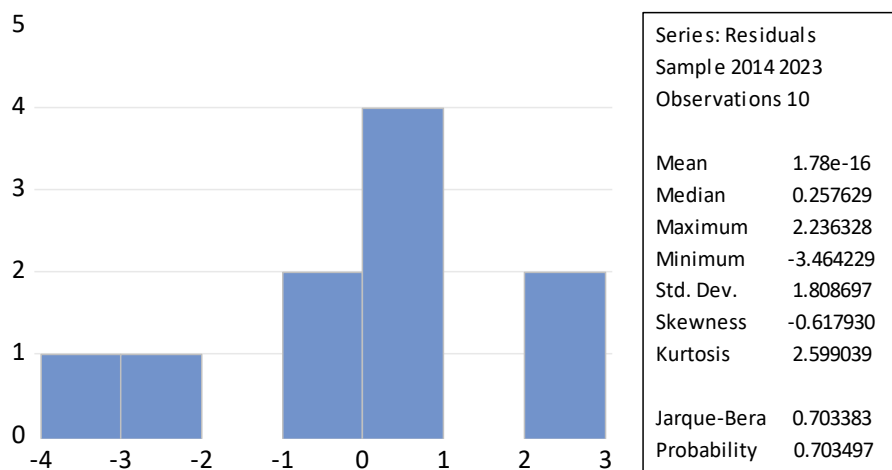
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian ini informasi atau datanya di analisis menggunakan teknik statistik. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu Pajak Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dengan periode 2014 – 2023. Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis (Uji t, Uji F dan Uji R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber : estimate Eviews

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik normal probability Plot. Pada pendekatan ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa

nilai probability *Jarque berra* sebesar $0,703497 > 0,05$, artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/29/24 Time: 19:39
Sample: 2014 2023
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.973493	1.983855	NA
PD	0.003961	1.557156	1.046063
BL	0.000923	1.248329	1.132750
BTL	0.000773	1.997516	1.178159

Sumber : estimate Eviews

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Centered VIF* dari variabel pajak daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah nilai lebih kecil dari 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas di dalam variabel penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.692850	Prob. F(3,6)	0.5891
Obs*R-squared	2.572923	Prob. Chi-Square(3)	0.4623
Scaled explained SS	0.740557	Prob. Chi-Square(3)	0.8636

Sumber : estimate Eviews

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Breusch-pagan-godfrey*, nilai prob nya sebesar $0,4623 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.086115	Prob. F(2,4)	0.9191
Obs*R-squared	0.412801	Prob. Chi-Square(2)	0.8135

Sumber : estimate Eviews

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob 0,8135 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PE
Method: Least Squares
Date: 10/29/24 Time: 19:37
Sample: 2014 2023
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.927205	0.986658	2.966789	0.0251
PD	-0.014466	0.062938	-0.229847	0.8258
BL	0.032306	0.030388	1.063113	0.3286
BTL	-0.011986	0.027811	-0.430982	0.6815
R-squared	0.166430	Mean dependent var		2.792000
Adjusted R-squared	-0.250354	S.D. dependent var		1.981048
S.E. of regression	2.215193	Akaike info criterion		4.717730
Sum squared resid	29.44248	Schwarz criterion		4.838765
Log likelihood	-19.58865	Hannan-Quinn criter.		4.584956
F-statistic	0.399320	Durbin-Watson stat		1.900466
Prob(F-statistic)	0.758751			

Sumber : estimate Eviews

1. Uji Parsial (Uji – t)

Hasil estimasi diketahui bahwa :

- Probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- Probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Tidak Langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Uji Simultan (Uji – F)

Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 0,399320 dengan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0,758751 ($>0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan bersamaan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Diketahui nilai R-squared sebesar 0.166430 maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan sebesar 16.64 %. Sedangkan sisanya sebesar 83,36 % dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probability $0.8258 > 0,05$ terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar -0.014466 . Artinya Pajak Daerah tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti meskipun ada hubungan antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan tersebut tidak cukup kuat atau tidak menunjukkan pengaruh yang jelas pada perekonomian, bahkan berpotensi menghambatnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Refilio Andika Pratama dan Shinta Widyastuti (2022) yang mana hasilnya didapatkan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Mirza Sayuti, Rizki Maulana, Kayyis Rifqan, Abrar (2023) dan Arfah Habib Saragih (2018) yang mana hasilnya pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Belanja Langsung memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan probability $0.3286 > 0,05$ terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar 0.032306 . Ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran langsung oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian, pengaruhnya tidak cukup besar atau konsisten untuk menghasilkan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Felix Farel Maga, Krest D. Tolosang, Agnes L. Ch. Lapijan (2016) dan Prisilia Tempone, Josep B. Kalangi, Hanly Fendy DJ, Siwu (2020) yang mana hasilnya didapatkan bahwa belanja langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tommy Prio Haryanto (2013) yang mana hasilnya didapatkan

bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011.

Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probability $0.6815 > 0,05$ terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar -0.011986 . Hal ini bisa menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak langsung (seperti transfer dana ke daerah atau subsidi) mungkin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi atau bahkan mungkin berdampak buruk. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabryel D. Purnomo, Debby Christina Rotinsulu dan Ita Pingkan Rorong (2022) yang mana hasilnya didapatkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Felixs Farel Maga, Krest D. Tolosangdan Agnes L. Ch. Lapian (2016) yang mana hasilnya didapatkan bahwa belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tommy Prio Haryanto (2013) yang mana hasilnya didapatkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, secara simultan, ketiga variabel tersebut yaitu Pajak Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung secara bersama - sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, meskipun ketiga faktor tersebut berperan dalam perekonomian daerah, gabungan dari ketiganya tidak memiliki dampak yang cukup besar atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan bahwa, meskipun ada pengaruh dari faktor-faktor tersebut, hasilnya tidak cukup signifikan atau kuat untuk mendorong perubahan besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama periode yang dianalisis. Faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Dan harapan untuk Pemerintah Provinsi Aceh kedepannya dapat memberikan kebijakan terhadap pengelolaan anggaran keuangan yang baik dalam Pajak Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sehingga anggaran keuangan kedepannya bisa lebih tepat sasaran guna untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, R., Usman, U., & Abbas, T. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 23-29.
- Dauhan, J. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. C. (2020). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29-35.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Kaontole, F. J., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Maga, F. F. (2016). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Mononimbar, R. W. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di kabupaten minahasa selatan (2005-2014). *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 17(02).
- Montolalu, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Langsung serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).
- Myles, G. D. (2000). Taxation and economic growth. *Fiscal studies*, 21(1), 141-168.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).
- Purnomo, G. D., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 121-132.
- Rambe, E. O. S., & Sakti, O. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua.
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020). Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 57-76.

- Ratno, F. A. (2019). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Karisidenan Surakarta (Analisis Data Panel Dinamis). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 26(1).
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683.
- Sayuti, M., Maulana, R., & Rifqan, K. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari*, 8(3), 114-124.
- Sjafrizal, E. (2008). *Ekonomi Regional, Teori Danaplikasi*. Baduose Media, Praninta Offset.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi teori pengantar*.
- Tempone, P., Kalangi, J. B., & Hanly Fendy DJ, S. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Utami, M. A., Ayu, P., Anwar, S., & Weriantoni, W. (2023). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2012-2021. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 185-194.
- Wijayanti, D., & Aji, M. R. B. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 379-389.
- Yuniwinsah, F., & Anis, A. (2020). Analisis Kausalitas Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Moneter Ekspansif dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 29-32.